

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, perekonomian nasional diorganisir melalui Kerjasama dan didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi serta asas kekeluargaan. Tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kekayaan, tetapi juga mencakup factor-faktor lain yang dapat terpisah dari aspek kekayaan, seperti kesejahteraan dan kebahagiaan.

Menurut Sukirno, (2015), pertumbuhan ekonomi menggambarkan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu negara, termasuk peningkatan dalam produksi industri, perkembangan infrastruktur, peningkatan jumlah sekolah, peningkatan dalam sektor jasa, dan peningkatan dalam produksi barang modal. Pertumbuhan ekonomi ini dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan, dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga sering diukur dengan pendapatan riil perkapita yang naik atau turun. Todaro, & Smith, (2006) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses berkelanjutan atau berkesinambungan yang melibatkan peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga menghasilkan tingkat

pendapatan dan output nasional yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu.

Dalam teori perekonomian, teori Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, mengemukakan bahwa dalam situasi ketidakseimbangan ekonomi, peningkatan belanja daerah atau investasi dapat merangsang pertumbuhan PDRB. Keynesianisme menyoroti peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan stagnasi ekonomi melalui kebijakan fiskal yang mencakup peningkatan belanja pemerintah. Dalam konteks ini, peningkatan belanja daerah dapat memiliki efek positif pada PDRB dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Hasoloan, (2014)

Pertumbuhan ekonomi mendorong dan memfasilitasi pembangunan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan tingkat keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengindikasikan sejauh mana aktivitas ekonomi dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dalam periode tertentu, karena aktivitas ekonomi pada dasarnya melibatkan penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output yang diukur dengan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Di tingkat regional atau provinsi, pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menghasilkan peningkatan produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan isu makroekonomi jangka

Panjang. Peningkatan ini terjadi karena factor-faktor produksi mengalami pertambahan baik dari segi jumlah maupun kualitas.

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) digunakan secara umum sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan perekonomian yang telah dilakukan oleh pemerintah di suatu wilayah dan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan di masa depan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun, sehingga jika ekonomi terus tumbuh tanpa mengalami penurunan, kondisi harga akan stabil dan kesempatan kerja akan terbuka luas. PDRB menjadi factor pendorong pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dan kinerjanya dapat dilihat melalui beberapa indikator makro. Indikator-indikator makro ini tercermin dalam PDRB, yang merupakan jumlah nilai tambah bruto yang diukur berdasarkan aktivitas semua unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah atau daerah tersebut dalam periode tertentu. PDRB berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi yang mengukur peningkatan produksi barang dan jasa, serta berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu

Pemahaman utama mengenai pertumbuhan ekonomi dari perspektif islam melibatkan pembatasan dalam masalah ekonomi. Perspektif Islam tidak sama dengan pandangan kapitalis yang berkaitan dengan kekayaan dan kelangkaan sumber daya. Dalam perspektif Islam, ekonomi dipandang sebagai sarana yang telah diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan

manusia dalam menghadapi tantangan kehidupan. Menurut Aburrahman Yusro, konsep pertumbuhan ekonomi telag dijelaskan pada Q.S Nuh 10-12:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِّنَاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ ١٢

Artinya: “Maka aku berkata (kepada mereka) “Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia adalah Maha Pengampun. Niscara Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu”.

Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai perubahan dan perkembangan dalam kegiatan ekonomi umat manusia seiring berjalannya waktu. Pertumbuhan ekonomi memiliki dimensi material-non material, yang meliputi kekayaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Namun, tujuan utama pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam adalah untuk memenuhi Pkebutuhan mansia dan menciptakan kesejahteraan social. Pencapaian tujuan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi ekonomi harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari riba (bunga) serta praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

Pembangunan di Propinsi Jawa Tengah yang berlangsung secara menyeluruh dan berkesinambungan telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sangat dirasakan

masyarakat merupakan agregat pembangunan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari usaha keras bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun di sisi lain berbagai kendala dalam memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber modal masih dihadapi oleh penentu kebijakan di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada sebagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto per kapita (PDRB per kapita) Nizar et al, (2013). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang tercermin dalam nilai PDRB yang meningkat, mengindikasikan kemajuan ekonomi di suatu daerah. Di luar dugaan, provinsi-provinsi di pulau Jawa (kecuali DKI Jakarta) memiliki pertumbuhan ekonomi yang tergolong rendah. Ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki oleh provinsi-provinsi di pulau Jawa. Faktor sumber daya alam ini adalah salah satu pendorong pertumbuhan daerah, selain pola investasi dan perkembangan infrastruktur transportasi (Pertumbuhan ekonomi masih dianggap sebagai indikator kesuksesan pembangunan secara keseluruhan, meskipun ia masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan individu. Diharapkan bahwa pembangunan di daerah akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi regional dapat tercermin dalam perubahan PDRB di wilayah tersebut. Menariknya, Provinsi Jawa

Tengah, meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, ternyata memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Dalam penelitian (Muazi & Arianti, 2013) menunjukkan bahwasanya Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), artinya setiap peningkatan investasi akan meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melainkan hal ini bertentangan dengan penelitian dari (Habibullah et al., 2018) menjelaskan bahwa Invesasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh signifikan terhadap PDRB akan tetapi secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai PDRB

Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting terhadap sukses tidaknya Pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan daerah Jawa Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan yang disesuaikan dengan potensi permasalahan Pembangunan di daerah. Bisa dilihat pada table 1.1, tentang perkembangan PDRB di semua provinsi di Jawa termasuk (DKI Jakarta)

Tabel 1. 1 Produk Domestik Bruto Regional Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018 - 2022 (Milyar Rupiah)

Provinsi	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
DKI Jakarta	1.735.208,29	1.836.240,55	1.792.291,09	1.856.075,82	1.953.464,85
Jawa Timur	1.563.441,82	1.649.895,64	1.611.392,55	1.668.749,44	1.757.821,43
Jawa	1.419.624,1	1.490.959,6	1.453.380,7	1.507.746,3	1.589.984,9

Provinsi	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Milyar Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Barat	4	9	2	9	3
Jawa Tengah	941.091,14	991.516,54	956.227,27	997.345,05	1.050.322,13
Banten	433.782,71	456.620,03	441.148,58	460.963,02	484.141,83
DI Yogyakarta	98.024,01	104.485,46	101.698,52	107.372,56	112.898,32

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2014)

Dari tabel di atas, PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut di Pulau Jawa menunjukkan perbedaan nilai PDRB disetiap provinsi. Tabel tersebut, memperlihatkan bahwa Provinsi yang berada di peringkat tertinggi yaitu DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berada pada peringkat terakhir. Dalam tabel tersebut, Provinsi Jawa Tengah berada di posisi keempat yang berarti lebih tinggi dari Banten dan rendah dari Jawa Barat. Pada tabel 1.1. juga menjelaskan bahwa pada tiap tahunnya PDRB Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, akan tetapi pada tahun 2020, seluruh Provinsi mengalami penurunan yang serentak diakibatkan adanya Covid-19 yang terjadi dan menyebabkan perekonomian dunia menurun.

Factor yang mempengaruhi PDRB di Jawa Tengah adalah Investasi, utamanya PMDN juga sangat mempengaruhi tinggi rendahnya PDRB. Yang perlu diperhatikan dengan PMDN merupakan aspek daya serap tenaga kerja, hal tersebut penting mengingat masih banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Sumber daya Manusia, tidak saja penting dari sudut kuantitas, tetapi yang tidak kalah pentingnya juga kualitas dari Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pendidikan

formal maupun non-formal dan dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana pengaruh investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Daerah dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Tengah pada tahun 1992 – 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 1992-2022?
2. Bagaimana pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 1992-2022?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB di Jawa Tengah tahun 1992-2022?

C. Tujuan Masalah

Penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB di Jawa Tengah, bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Investasi terhadap PDRB di Jawa Tengah.

2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Tenaga Kerja terhadap PDRB di Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB di Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan yang bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan serta pengetahuan yang telah didapatkan selama peneliti berada di bangku kuliah. Dalam penelitian ini juga menambah wawasan terhadap pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Belanja daerah, terhadap PDRB di Jawa Tengah dari tahun 1992 – 2022.

2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dengan adanya penelitian ini, nantinya diharapkan akan dapat digunakan sebagai saran atau masukan dalam permasalahan yang terkait. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa memperkaya ilmu pengetahuan, terutama untuk bidang Ekonomi di Indonesia.

3. Bagi Pihak Lain

Peneliti berharap, untuk pihak lain bisa dijadikan sebagai referensi yang dapat membantu peneliti-peneliti lainnya dalam menyelesaikan permasalahan yang sama.

